

## **Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukapura**

Community Participation in the Development of a Clean Water Supply System through Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) in Kelurahan Sukapura

<sup>1</sup>Afi Rafita, <sup>2</sup>Ernawati Hendrakusumah

<sup>1,2</sup>*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>arafitaar@gmail.com, <sup>2</sup>erkoes18@gmail.com*

**Abstract.** Clean water supply system is a fundamental requirement to improve the quality of life and well-being of people living in urban slums. The Government formed a city without Slums Programme (KOTAKU) to prevent and improve the quality of slums in urban areas through the development of infrastructure with the concept of community empowerment. However, the participation of the community in the development of the system of provision of clean water through the course of KOTAKU in Kelurahan Sukapura indicated that each of the stages was composed and performed by other parties who have specific interests. In addition, the community cannot be said to be independent in its implementation and have a sense of community is reluctant to follow the program. Results of the study stated that the level of public participation in the development of a clean water supply system through KOTAKU in Kelurahan Sukapura consultative participation levels are on, it means the community participate in a way consultation, while the community has not had the opportunity to make decisions together. Despite the public enthusiasm, people still need to be accompanied by a team of facilitators because public knowledge about physical development undertaken is still lacking. The community still needs to be accompanied by the programs through a team of facilitators regarding planning, implementation, management, utilization up to scrutiny on physical development. Recommendations are given is the need for the intensity of the socialization program so that the public gets the knowledge of the program; motivate people to participate by providing training, extension and improvement of the ability of the community before the program takes place; implement the concept of Bottom-Up Planning in order to awaken the stakeholder dialogue; as well as provide information about spatial plan, structuring the environment, licensing and technical standards in the framework of prevention and improved quality of the slums.

**Keywords:** Community Participation, Program KOTAKU.

**Abstrak.** Sistem penyediaan air bersih merupakan syarat mendasar peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan. Pemerintah membentuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh di perkotaan melalui pembangunan infrastruktur dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui Program KOTAKU di Kelurahan Sukapura diindikasikan bahwa setiap tahapannya disusun dan dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Selain itu, masyarakat belum dapat dikatakan mandiri dalam pelaksanaannya dan memiliki rasa enggan dari masyarakat untuk mengikuti program tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui Program KOTAKU di Kelurahan Sukapura berada pada tingkat partisipasi konsultatif, artinya masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan masyarakat belum memiliki peluang untuk membuat keputusan bersama. Walaupun masyarakat antusias, masyarakat masih perlu didampingi oleh tim fasilitator karena pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan fisik yang dilakukan masih kurang. Masyarakat masih perlu didampingi oleh pihak program melalui tim fasilitator mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengelolaan hingga pengawasan pada pembangunan fisik yang dilakukan. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya intensitas sosialisasi program agar masyarakat mendapat pengetahuan mengenai program; memotivasi masyarakat agar mampu berpartisipasi dengan memberikan pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kemampuan masyarakat sebelum program berlangsung; mengimplementasi konsep Bottom Up Planning agar terbangun dialog antar stakeholder; serta memberikan pelayanan informasi mengenai rencana tata ruang, penataan lingkungan, perizinan dan standar teknis dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Program KOTAKU.

## A. Pendahuluan

Sistem penyediaan air bersih merupakan syarat mendasar bagi meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan. Penyediaan air bersih adalah bentuk pelayanan publik yang penyediaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah terbatas dalam penyediaannya, sedangkan masyarakat tidak memiliki inisiatif dalam berpartisipasi dan perlu dorongan melalui suatu komunikasi pembangunan. Pemerintah wajib bekerja sama dengan masyarakat dalam prosesnya. Hal tersebut dilakukan untuk merangsang dan mengarahkan peran dari komunitas dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program nasional pemerintah yang bersifat stimulan yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berada dalam naungan Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) yang dilaksanakan di 271 Kota/Kabupaten di 34 Provinsi dengan luasan kumuh sebesar 38.431 Ha yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kelurahan Sukapura termasuk salah satu kelurahan yang terpilih dalam pelaksanaan Program KOTAKU. 7 RW dari 15 RW menjadi target pengentasan luasan kawasan kumuh seluas 19,33 Ha yang terbagi atas RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06 dan RW 07 dengan tingkat kekumuhan yang beragam. Kondisi sistem penyediaan air bersih di Kelurahan Sukapura kurang memadai. Masyarakat yang menggunakan sumur menilai kurang efektif, karena apabila musim kemarau tiba, sumur yang dimiliki masyarakat tersebut mengering, sehingga dapat terjadi kekurangan air. Selain itu, masyarakat yang menggunakan pelayanan *supplier* air gunung menilai sangat tidak efektif, selain harganya yang tinggi ketersediaannya pun sangat terbatas hanya dapat memenuhi beberapa masyarakat saja. Oleh karena itu, Kelurahan Sukapura termasuk kategori percepatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan fokus pada pengembangan sistem penyediaan air bersih.

Dalam pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air bersih pada 7 RW di Kelurahan Sukapura, diduga bahwa proses partisipasi dalam terciptanya pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Terlihat dari mayoritas masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat dalam proses tersebut. Sehingga diindikasikan setiap tahapannya disusun dan dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Kebanyakan masyarakat belum siap untuk berinisiatif dan sering timbulnya rasa enggan dari masyarakat karena merasa kegiatan tersebut hanya memberi keuntungan bagi pihak tertentu. Selain itu, pembangunan fisik yang difokuskan terhadap hasil daripada prosesnya, menyebabkan masyarakat menjadi apatis dengan kegiatan ini.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat melalui identifikasi bentuk partisipasi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap keberlanjutan dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

## B. Landasan Teori

### Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program KOTAKU merupakan pendamping teknis untuk mencapai sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% atau 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha, serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di

kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Program ini merupakan inisiasi Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dilaksanakan di 271 Kota/Kabupaten di 34 Provinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, Kota/Kabupaten, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Kriteria permukiman kumuh yang digunakan pada Program KOTAKU ini menggunakan indikator 7+1 yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR), yaitu sarana dan prasarana yang mencakup: a) Keteraturan Bangunan; b) Jalan Lingkungan; c) Drainase Lingkungan; d) Penyediaan Air Bersih/Minum; e) Pengelolaan Persampahan; f) Pengelolaan Air Limbah; g) Pengamanan Kebakaran; dan h) Ruang Terbuka Publik.

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program KOTAKU adalah sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; 2) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat; 3) Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor; 4) Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya; 5) Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian; 6) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota; 7) Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan; 8) Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan 9) Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

Selain itu, adapun prinsip yang ditetapkan pada pelaksanaan Program KOTAKU adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah sebagai Nakhoda, Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya; 2) Perencanaan komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi Kota/Kabupaten yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang (2019); 3) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; 4) Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota; 5) Kreatif dan Inovatif; 6) Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU;

7) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*); 8) Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan; 9) Revitalisasi peran BKM dengan penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

### **Partisipasi Masyarakat**

Pengertian partisipasi masyarakat banyak dikemukakan oleh para ahli. Pengertian partisipasi secara umum mengandung arti keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan baik individu maupun kelompok. Adapun pendapat dari Raharjo (1983) dalam Theresia, *et al.* (2015:196), bahwa keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lain. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pemberian informasi, perumusan masalah, penyusunan rencana, pengambilan keputusan bagi pelaksanaan dan pemanfaatan hingga evaluasi pada suatu kegiatan.

### **Tingkatan Partisipasi Masyarakat**

Tingkatan partisipasi masyarakat merupakan suatu gambaran dari kesadaran dan kesukarelaan masyarakat dalam pembangunan, serta dapat menjadi tolak ukur bagi kesuksesan suatu pembangunan yang dilakukan. Tingkat partisipasi masyarakat menurut Hopley (1996) dalam Theresia, *et al.* (2015:204-206) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari tujuh tingkatan, yaitu 1) Partisipasi pasif/manipulasi; 2) Partisipasi informatif; 3) Partisipasi konsultatif; 4) Partisipasi insentif; 5) Partisipasi fungsional; 6) Partisipasi interaktif; dan 7) *Self-Mobilization*. Partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai input dan output dalam pembangunan, karena pada dasarnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dari pembangunan.

## **C. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan rasionalistik. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secara holistik (Moleong, 2002:3). Sedangkan pendekatan rasionalistik dipilih sebagai pemikiran dalam bentuk teori yang dijadikan suatu landasan dalam menelaah fenomena atau gejala-gejala yang terjadi di lapangan.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Bentuk Partisipasi Masyarakat**

#### **1. Bentuk Partisipasi pada Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui Program KOTAKU di Kelurahan Sukapura, terdapat dua kegiatan yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yaitu sosialisasi program dan pengumpulan data primer. Pada pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam pemetaan partisipasi. Masyarakat memberikan informasi mengenai batasan-batasan wilayahnya yang mencakup RT dan RW, serta memberikan informasi mengenai potensi dan masalah yang ada di wilayahnya masing-masing. Seluruh masyarakat diundang untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pada program ini oleh BKM melalui Ketua RW dan Ketua RT Tahap persiapan ini bersifat terbuka untuk seluruh lapisan

masyarakat, bukan hanya untuk masyarakat yang memiliki jabatan atau kepentingan tertentu

Pada tahap ini, responden yang memberikan informasi mengenai lingkungan kawasannya sebanyak 51 responden (48,6%), interaksi tanya jawab sebanyak 10 responden (9,5%) dan pemberian saran/ide/gagasan sebanyak 44 responden (41,9%). Partisipasi terbesar dalam pemberian informasi berada di RW 03 dan RW 04 sebanyak 9 responden (8,6%) dan yang terendah berada di RW 07 sebanyak 4 responden (3,8%). Partisipasi dalam interaksi tanya jawab cenderung rendah dan yang paling tinggi berada di RW 02 sebanyak 3 responden (2,9%). Selain itu, partisipasi pada pemberian saran/ide/gagasan yang paling tinggi berada di RW 02 sebanyak 10 responden (9,5%). Sedangkan pada pengumpulan data primer, partisipasi paling tinggi dalam pemberian informasi mengenai batasan RT/RW serta potensi dan masalah wilayahnya berada di RW 02 yaitu sebanyak 11 responden (10,5%), sedangkan yang paling rendah berada di RW 07 yaitu sebanyak 4 responden (3,8%).

## **2. Bentuk Partisipasi pada Tahap Perencanaan**

Pada tahap persiapan pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui Program KOTAKU di Kelurahan Sukapura, terdapat dua kegiatan yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yaitu penyusunan proposal rencana dan penguatan kapasitas masyarakat. Tahap perencanaan ini, mengundang seluruh masyarakat melalui Ketua RW dan Ketua RT. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan pada seluruh kegiatan dalam tahapan ini karena masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan agar rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat berjalan dengan baik.

Pada tahap ini, responden yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan proposal pada tahap perencanaan adalah sebanyak 53 responden (50,5%) pada pemberian saran/ide/gagasan dan 56 responden (53,3%) pada pengambilan keputusan rencana. Partisipasi paling tinggi dalam pemberian saran/ide/gagasan berada di RW 02 sebanyak 10 responden (9,5%) dan yang paling rendah berada di RW 07 sebanyak 5 responden (4,8%). Sedangkan partisipasi paling tinggi dalam pengambilan keputusan rencana berada di RW 02 sebanyak 11 responden (10,5%) dan yang paling rendah berada di RW 07 sebanyak 5 responden (4,8%).

## **3. Bentuk Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk uang, tenaga, material, atau keahlian sebagai salah satu wujud partisipasinya. Tingginya partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan bersifat stimulan, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk semakin kuat dalam berpartisipasi. Masyarakat sudah mulai menyadari manfaat dari kegiatan yang dilakukan demi meningkatkan kualitas lingkungannya.

Bentuk partisipasi yang paling tinggi pada tahap pelaksanaan ini adalah dalam bentuk tenaga sebesar 32,4%, lalu diikuti oleh partisipasi dalam bentuk uang sebesar 14,3%, partisipasi dalam bentuk keahlian sebesar 12,4% dan yang paling rendah adalah partisipasi dalam bentuk material sebesar (4,8%). Partisipasi dalam bentuk uang bertujuan untuk mengganti kehadiran masyarakat yang tidak dapat ikut serta secara langsung. Partisipasi dalam bentuk tenaga bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tidak menggunakan pekerja diluar masyarakat Kelurahan Sukapura dan meminimalisir dana yang diberikan oleh pemerintah. Lalu, partisipasi dalam bentuk material bertujuan untuk menggantikan kehadiran masyarakat dengan material yang mendukung pengembangan sistem penyediaan air bersih. Sedangkan, partisipasi dalam bentuk keahlian dengan cara menyumbangkan keahlian yang dimiliki individu pada masyarakat

untuk membantu kelangsungan pelaksanaan pengembangan sistem air bersih, seperti memasak, menyusun pembukuan keuangan dan lainnya.

#### 4. Bentuk Partisipasi pada Tahap Keberlanjutan

Pada tahap keberlanjutan, masyarakat sangat diharapkan berpartisipasi pada penyusunan aturan bersama dan sistem operasi dan pemeliharaan (O&P). Hal tersebut sangat diperlukan agar pembangunan yang telah dilaksanakan memiliki manfaat yang berkelanjutan dan dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat. Apabila masyarakat kurang berpartisipasi di khawatirkan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan tidak optimal atau hanya bersifat sementara selama program berlangsung saja.

Responden yang aktif berpartisipasi dalam pemberian saran/ide/gagasan sebanyak 40 responden (38,1%) dan dalam pembentukan organisasi pengawasan pemanfaatan hasil program sebanyak 51 responden (48,6%). Partisipasi masyarakat cenderung menurun dibandingkan dengan tahapan pelaksanaan. Masyarakat beralasan bahwa untuk memelihara hasil program tidak perlu mengikuti organisasi pengelolaan dan pemeliharaan, sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Kelurahan Sukapura. Selain itu, mata pencaharian masyarakat menjadi faktor tidak berpartisipasi dimana adanya pertentangan soal waktu bekerja yang mempengaruhi partisipasi. Selain itu, menurut informasi yang didapat hasil pembangunan sistem penyediaan air bersih di kelola oleh organisasi pengawasan dan pemanfaatan hasil program dengan cara pemeriksaan berkala pada mesin pompa air (*submersible*) di setiap RW, serta melakukan gotong royong pembersihan dan pengecekan *submersible* dalam dua bulan sekali dan pembagiannya berdasarkan jadwal piket yang sudah dirundingkan saat pembentukan organisasi serta hasil persetujuan seluruh lapisan masyarakat.

#### Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi menggambarkan sejauh mana andil masyarakat masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui Program KOTAKU dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap keberlanjutan. Dalam menganalisis tingkat partisipasi responden, maka penulis merujuk teori Hobley (1996) yang menyatakan bahwa terdapat tujuh tingkatan partisipasi berdasarkan andil masyarakat dalam memberikan pengaruh pada suatu perencanaan.

**Tabel 1.** Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih melalui Program KOTAKU di Kelurahan Sukapura

No.	Variabel	Frekuensi Responden				Jumlah
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Partisipasi Pasif/Manipulatif: Masyarakat hanya sekedar datang dan memberi informasi, serta pengumuman sepihak oleh pelaksana tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat.	45	42,86	60	57,14	105
2.	Partisipasi Informatif: Masyarakat hanya menjawab pertanyaan dan tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses pelaksanaan.	7	6,67	98	93,33	105
3.	Partisipasi Konsultatif: Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi dan sebagai masukan	74	70,48	31	29,52	105

No.	Variabel	Frekuensi Responden				Jumlah
		Ya	%	Tidak	%	
	untuk ditindaklanjuti masalah dan pemecahannya.					
4.	Partisipasi Insentif: Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan program setelah pembiayaan dihentikan	47	44,76	58	55,24	105
5.	Partisipasi Fungsional: Masyarakat membentuk kelompok setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati	62	59,05	43	40,95	105
6.	Partisipasi Interaktif: Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.	63	60,00	42	40,00	105
7.	<i>Self Mobilization</i> (Mandiri): Masyarakat memegang kendali penuh atas seluruh kegiatan serta pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya yang ada atau digunakan.	44	41,90	61	58,10	105

Sumber: Hasil Analisis, 2018.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui Program Kotaku di Kelurahan Sukapura termasuk ke dalam tingkat partisipasi konsultatif. Tingkatan ini merupakan partisipasi yang rendah dan memiliki arti masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Masyarakat juga belum memiliki peluang untuk membuat keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

Terbukti pada fakta dilapangan walaupun masyarakat antusias dalam memutuskan suatu rencana bagi peningkatan kualitas lingkungannya, masyarakat masih perlu didampingi oleh tim fasilitator karena pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan fisik yang dilakukan masih sangat kurang. Masyarakat masih memerlukan dampingan dari pihak program melalui tim fasilitator mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengelolaan hingga pengawasan pada pembangunan fisik yang dilakukan. Masyarakat mengajukan saran/ide/gagasan sebagai bentuk partisipasinya pada pengembangan sistem penyediaan air bersih, tetapi oleh pihak tim fasilitator dipertimbangkan kembali agar rencana yang diputuskan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku. Masyarakat diharapkan mendapat banyak pengetahuan dan pembelajaran baru mengenai pembangunan fisik yang dilakukan pada saat berpartisipasi secara konsultatif.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui Program KOTAKU di Kelurahan Sukapura, menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang, hal ini terlihat dari karakteristik dan bentuk peran serta masyarakat sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam kegiatan sosialisasi program, persentase bentuk partisipasi pemberian informasi lingkungan kawasan paling tinggi di RW 03 dan RW 04 sebesar 8,6%, persentase bentuk partisipasi interaksi tanya jawab berada di RW 02 sebanyak 2,9% dan persentase bentuk partisipasi pemberian saran/ide/gagasan berada di RW 02 sebesar 9,5%. Sedangkan, dalam kegiatan pengumpulan data primer, persentase bentuk partisipasi pemberian informasi mengenai batas wilayah RT/RW, potensi dan masalah wilayah berada di RW 02 sebesar 10,5%.

2. Tahap Perencanaan

Dalam kegiatan penyusunan proposal rencana, persentase bentuk partisipasi pemberian saran/ide/gagasan rencana paling tinggi berada di RW 02 sebesar 9,5% dan persentase bentuk partisipasi pengambilan keputusan rencana berada di RW 02 sebesar 10,5%. Sedangkan, dalam kegiatan penguatan kapasitas masyarakat, persentase bentuk partisipasi keterlibatan dalam organisasi pelaksanaan sebesar 38,1%.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, persentase partisipasi masyarakat sebesar 66,7% dengan bentuk partisipasi dalam bentuk tenaga sebesar 32,4%.

4. Tahap Keberlanjutan

Pada tahap keberlanjutan, persentase partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi pemberian saran/ide/gagasan penerapan aturan bersama (AB) dan sistem operasi dan pengelolaan (O&P) paling tinggi berada di RW 02 sebesar 38,1% dan persentase partisipasi masyarakat dalam bentuk pembentukan organisasi pengawasan pemanfaatan hasil program paling tinggi berada di RW 02 sebesar 9,5%.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui Program KOTAKU di Kelurahan Sukapura berada pada tingkat partisipasi konsultatif. Tingkatan ini merupakan partisipasi yang rendah dan memiliki arti masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Masyarakat juga belum memiliki peluang untuk membuat keputusan bersama, serta para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

Walaupun masyarakat antusias dalam memutuskan suatu rencana bagi peningkatan kualitas lingkungannya, masyarakat masih perlu didampingi oleh tim fasilitator karena pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan fisik yang dilakukan masih kurang. Masyarakat masih memerlukan dampingan dari pihak program melalui tim fasilitator mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengelolaan hingga pengawasan pada pembangunan fisik yang dilakukan. Masyarakat diharapkan mendapat banyak pengetahuan dan pembelajaran baru mengenai pembangunan fisik yang dilakukan pada saat berpartisipasi secara konsultatif.

### Rekomendasi

1. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan intensitas sosialisasi Program KOTAKU, agar masyarakat mendapat banyak pengetahuan dan mengerti mengenai keuntungan yang dapat diperoleh bila masyarakat berpartisipasi dalam program ini serta dapat meminimalisir keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu diluar Program KOTAKU.
2. Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai konsep *Bottom-Up Approach* kepada masyarakat sehingga dapat



terbangun dialog antar stakeholder untuk merumuskan masalah-masalah yang terjadi dan mampu membuat keputusan bersama untuk menentukan langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti.

3. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengadakan pendampingan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, bimbingan dan bantuan teknis serta pelayanan informasi untuk membuka akses bagi masyarakat mengenai rencana tata ruang, penataan lingkungan, perizinan dan standar teknis dalam rangka peningkatan kualitas permukiman di Kelurahan Sukapura, agar masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik.
4. Dapat dijadikan studi lanjutan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang terjadi pada kondisi saat ini dengan tujuh indikator lain, seperti keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sistem pengolahan air limbah, pengolahan sampah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau. Selain itu, dapat dilakukan analisis berdasarkan faktor atau motivasi partisipasi masyarakat karena diindikasikan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat mempunyai hasil yang berbeda.

### Daftar Pustaka

- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat (Kedua)*. Bandung: Alfabeta.ma, Buchari. 2006. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alvabeta.
- Widyonindito, S. 2003. *Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang*. Magelang: Universitas Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukapura Tahun 2016.